

VOLUME: 3

ISSN: 2085-9945



Dialogia Iuridica

Volume: Nomor: Halaman:

ISSN:

Ilmu Hukum

3

1

1 - 148

November 2011

2085-9945

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
<i>Transparansi Merupakan Pintu Keudilan dan Kebenaran</i>	1
H. Harifin A. Tumpa	
<i>Kemandirian Komite Audit Bank Umum yang Berbentuk Badan Usaha Milik Negara Go Publik dalam Rangka Pencapaian Konsep Good Corporate Governance</i>	18
Dyah Nur Sasanti	
<i>Special Purpose Vehicle ("Spv") dalam Transaksi Asset Backed Securities Efek Beragun Aset ("EBA") Menurut UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo Peraturan Bapepam & LK No. 1x.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep. 493/BI/2008 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset ("Asset Backed Securities")</i>	27
Marisa Adiwilaga dan Christian Andersen	
<i>Analisa Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Pencurian Tunggakan Pajak Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan</i>	50
Jerry dan Incz Felicia	
<i>Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empirik Pada Perusahaan Go Public yang Termasuk Kelompok Sepuluh Besar Menurut Corporate Governance Perception Index (CGPI) di Bursa Efek Indonesia</i>	71
Meythi dan Lusiyana Devita	
<i>Aspek Hukum Penataan Ruang Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Bisnis</i>	90
Octavianus Hartono	
<i>Pencegahan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan oleh Eksekutif Perusahaan berdasarkan Sarbanes-Oxley Act Section 302</i>	101
Rapina dan Hans Eliczer	
<i>Mengembalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kepada Masyarakat (Studi Kasus di Bangka)</i>	130
Finalia dan Magdalena Zebua	
Biodata Penulis	145

Pencegahan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan oleh Eksekutif Perusahaan berdasarkan Sabanes Oxley-Act Section 302

Rapina

Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha

Hans Eliezer

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha

Abstract

Nowadays, many public companies in Indonesia still don't know the importance of internal controls in order to prevent the practice of fraud. For public companies, that kind of fraud is very detrimental to the investors, shareholders and other stakeholders is fraudulent financial reporting.

The most horrendous fraud is the case of Enron in the United States involving public accounting firm Arthur Andersen. The case eventually led to a decree or a deed-called Sarbanes Oxley Act of 2002. Sarbanes Oxley main goal is to increase public trust towards the implementation of GCG (Good Corporate Governance) for Go Public Companies. The result showed that, Sarbanes Oxley has a strong influence on the role of corporate executives in order to prevent fraudulent financial reporting. From these results the authors provide suggestions for PT.Telkom to maintain application performance Sarbanes Oxley section 302 because it proved to have a positive effect in preventing fraudulent financial reporting. In addition, authors also provide suggestions for PT.Telkom to apply the Sarbanes Oxley thoroughly to combat fraudulent and to make PT.Telkom's performance can be better.

Kata kunci : *Sarbanes-Oxley Act Section 302, Peranan Eksekutif Perusahaan, Fraudulent Financial Reporting*

PENDAHULUAN

Dewasa ini perusahaan publik di Indonesia banyak yang belum mengetahui arti pentingnya pengendalian internal dalam rangka mencegah terjadinya praktik kecurangan (fraud). Menurut Muh. Arief Effendi dalam makalahnya yang berjudul *Sarbanes Oxley Act* Sebagai Implementasi GCG serta dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia, Edisi No. 12, Tahun II, (Oktober 2008 : 39-40), fraud bisa terjadi kapan saja di perusahaan mana saja. *Fraud* bisa dilakukan oleh pihak internal perusahaan (karyawan & manajemen) atau pihak eksternal perusahaan.

Fraud biasanya terjadi karena adanya kolusi, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun dengan pihak eksternal perusahaan. Bagi perusahaan publik, *fraud* yang sangat merugikan pihak investor, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya adalah kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*). Pengertian *fraudulent financial reporting* menurut Arens, Alvin, Elder, Beasley dalam bukunya *Auditing & Assurance Services An Integrated Approach* (2008 : 338) adalah sebagai berikut

:

“Fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive users. Most cases of fraudulent financial reporting involve the intentional misstatement of amounts not disclosures. For example, WorldCom is reported to have capitalized as fixed asset, billions dollars that should have been expensed. Omission of amounts are less common, but a company can overstate income by omitting account payable and other liabilities. Although less frequent, several notable cases of fraudulent financial reporting involved adequate disclosure. For example, a central issue in the Enron case was whether the company had adequately disclosed obligations to affiliates known as special purpose entities.”

Fraud yang paling menghebohkan salah satunya adalah kasus Enron di Amerika Serikat yang melibatkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen seperti yang dicontohkan Arens dalam pernyataannya di atas. Kasus tersebut akhirnya melahirkan sebuah ketetapan atau akta yang disebut *Sarbanes-Oxley Act of 2002*.

Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002) atau kadang disingkat SOA atau Sarbox adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar yang termasuk di antaranya melibatkan Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems, dan WorldCom. Akta yang diberi nama berdasarkan dua pencetusnya, Senator Paul Sarbanes dan Representatif Michael G. Oxley, ini disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush. Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan ini, mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional.

Sekilas tentang skandal Enron, Enron merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di dunia yang menjadi kebanggaan Amerika Serikat. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Pengumuman kepada pers menyatakan bahwa proforma laba bersih Enron telah meningkat menjadi \$ 393 juta pada triwulan ketiga tersebut, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah \$ 292 juta. Pimpinan Enron, Kenneth Lay menyatakan bahwa Enron ‘secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik’ dan ia tidak memberikan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus (*special accounting charge/expense*) sebesar \$ 1 miliar yang menyebabkan hasil actual pada periode tersebut, yang bila dilaporkan sesuai GAAP akan menjadi kerugian sebesar \$ 644 (diambil dan diterjemahkan dari artikel berjudul *Enron Debacle* yang diakses dari www.riskglossary.com pada tanggal 15 Maret 2009).

Pengumuman kepada pers tersebut memberikan peringatan kepada Wall Street. Para analis dan reporter bisnis mulai mencari tahu apa yang terjadi di balik pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar \$ 1 miliar tersebut. Setelah diselidiki, ternyata diketahui bahwa pembebanan tersebut berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan yang didirikan oleh direktur keuangan Enron. Terbukanya rahasia ini menimbulkan kecurigaan terhadap Enron. Kecurigaan tersebut semakin kuat ketika diketahui lebih rinci tentang perusahaan yang didirikan direktur keuangan Enron, cara yang digunakan untuk melaporkan pendapatan, dan budaya perusahaan secara umum. Harga saham perusahaan turun drastis dari \$ 36,00 per lembarnya pada minggu sebelum 16 Oktober 2001 hingga menjadi \$ 0,26 per lembar pada tanggal 30 November 2001. Kemudian Enron mengajukan permohonan untuk dinyatakan bangkrut pada tanggal 2 Desember 2001, yang merupakan kasus kebangkrutan paling besar dalam sejarah Amerika Serikat (diambil dan diterjemahkan dari artikel berjudul *Enron Debacle* yang diakses dari www.riskglossary.com pada tanggal 15 Maret 2009).

Tujuan utama *Sarbanes-Oxley* adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi prinsip GCG (*Good Corporate Government*) bagi perusahaan yang telah go public. *Sarbanes-Oxley* mewajibkan perusahaan yang listing di NYSE (*New York Stock Exchange*) untuk mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku untuk menjamin transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, *Sarbanes-Oxley* juga menjamin adanya kepastian terhadap integritas pelaporan keuangan (*integrity of financial reporting*). *United States - Securities Exchange Commission (US-SEC)* juga telah mengadopsi *Sarbanes-Oxley* sebagai syarat untuk memperketat persyaratan disclosure laporan keuangan serta menjamin akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, *Sarbanes-Oxley* mewajibkan perusahaan publik untuk mereformasi tanggung jawab manajemen perusahaan perihal keterbukaan informasi keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) yang bermula dari kecurangan akuntansi (*accounting fraud*). Amerika Serikat menerapkan regulasi ini secara ketat, antara lain meliputi pelaporan keuangan yang akurat dan tidak bias, review pengendalian intern serta kewajiban untuk menerapkan *Code of Ethics* dan *Code of Corporate Governance*. *Sarbanes-Oxley* juga menuntut standar yang sangat tinggi terhadap operasi bisnis dan pelaksanaan audit atas pengendalian intern. (Muh. Arief Effendi, *Sarbanes Oxley Act* Sebagai Implementasi GCG, Akuntan Indonesia, Edisi No. 12, Tahun II, Oktober 2008, hal. 39-40).

Sarbanes-Oxley mewajibkan perusahaan yang listing di NYSE (*New York Stock Exchange*) untuk membuat dokumentasi pengendalian kunci dan melaporkan kondisi pengendalian internnya secara periodik. *Sarbanes-Oxley Act of 2002, Title III, section 302 (2002 : 33) tentang "Corporate Responsibility for Financial Reports"* menetapkan bahwa pejabat eksekutif perusahaan harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pernyataan prosedur pengendalian, internal control, dan jaminan atas kecurangan (*fraud*). *Sarbanes-Oxley Act of 2002, Title IV, section 404 (2002 : 45) tentang "Management Assessment of Internal Controls"* mengatur ketentuan yang mewajibkan terselenggaranya audit tahunan yang menunjukkan laporan pengendalian internal (*internal control report*).

Sejalan dengan adanya *Sarbanes-Oxley*, maka pemerintah Indonesia pun menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Sarbanes-Oxley*. Beberapa ketentuan yang terutama terkait dengan *Sarbanes-Oxley section 302 dan section 404* adalah sebagai berikut :

- *Certification of Financial Reports* dimana *CEO* dan *CFO* diwajibkan memberikan "sertifikasi" terhadap financial statements. Di Indonesia sertifikasi terhadap financial statements diatur dalam :

1. Peraturan Bapepam No.VIII.GA.11 : Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan. Peraturan Bapepam ini lebih menegaskan bahwa tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan ada pada direksi ; penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ; informasi dalam laporan keuangan telah dibuat dengan lengkap dan benar ; di mana laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar serta tidak menghilangkan informasi material ; dan direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern perusahaan.

2. WK No.511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun. Pengurus Dana Pensiun harus membuat pernyataan atas portofolio investasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur Investasi Dana Pensiun ; arahan investasi bagi dana pensiun pemberi kerja ; dan pilihan investasi peserta bagi dana pensiun lembaga keuangan.

- Pengenaan sanksi yang berat bagi eksekutif yang memberikan false informations or mislead their auditor, di Indonesia aturan ini dimuat dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 : Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan. Jika direksi tidak memberikan informasi dengan benar, Bapepam

dapat menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Ketentuan ini mulai berlaku untuk laporan keuangan per 31 Desember 2003.

- Laporan keuangan harus mencerminkan *all material correcting adjustments* dan mengungkapkan *all material off-balance sheet transactions* serta *other relationship with unconsolidated*. Perubahan material kondisi keuangan dan hasil usaha emiten harus dilaporkan *on a rapid current basis (real time disclosure)*, dalam pelaksanaannya di Indonesia Bapepam mengatur lebih rinci mengenai penyajian dan pengungkapan untuk perusahaan yang go public dalam pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan industri.

- Annual report must be containing internal control report, di Indonesia aturan ini dimuat dalam Peraturan Bapepam No.VII.G.12 :Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan. Dalam tanggung jawabnya, direksi dituntut untuk memahami betul akan kebenaran dan kelengkapan dokumen informasi keuangan perusahaan, termasuk pengendalian internnya. Ini harus tercermin dalam laporan keuangan. *Sarbanes-Oxley section 302* tentang “*Corporate Responsibility for Financial Reports*” mengatur ketentuan yang mewajibkan eksekutif dan direksi perusahaan bertanggung jawab secara pribadi terhadap pernyataan prosedur pengendalian, internal control, dan jaminan atas kecurangan (*fraud*). Hal tersebut sesuai dengan isi *Sarbanes-Oxley Act of 2002 (2002 : 33)*. Eksekutif dan direksi perusahaan mempunyai peranan yang sangat besar dan penting terhadap penerapan *Sarbanes-Oxley section 302* dalam rangka mencegah *fraudulent financial reporting* di perusahaan. Selain itu eksekutif dan direksi perusahaan juga mempunyai tanggung jawab baru sehubungan dengan peranannya dalam proses implementasi *Sarbanes-Oxley* di perusahaan.

Hal itulah yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara penerapan *Sarbanes-Oxley Act*, khususnya *section 302*, dalam rangka mencegah *fraudulent financial reporting*. Dan penulis bermaksud untuk membahas hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul :

“Pengaruh Penerapan *Sarbanes-Oxley Act Section 302* Terhadap Peranan Eksekutif Perusahaan Dalam Rangka Mencegah *Fraudulent Financial Reporting*”

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi yang berhubungan dengan peranan eksekutif perusahaan dalam kaitannya dengan penerapan *Sarbanes-Oxley* khususnya *section 302*, yaitu :

1. Adakah pengaruh antara penerapan *Sarbanes-Oxley section 302* terhadap peranan eksekutif perusahaan.
2. Adakah pengaruh antara penerapan *Sarbanes-Oxley section 302* terhadap *fraudulent financial reporting*.
3. Adakah pengaruh antara peranan eksekutif perusahaan terhadap *fraudulent financial reporting*.
4. Apakah penerapan *Sarbanes-Oxley Section 302* berpengaruh terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangka mencegah *fraudulent financial reporting*.

KERANGKA TEORITIS

Sarbanes-Oxley Act

Sarbanes-Oxley merupakan nama populer untuk undang-undang yang memiliki nama lengkap “*Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002*”. Undang-undang ini ditandatangani oleh presiden Amerika Serikat, George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Nama *Sarbanes-Oxley* berasal dari nama dua orang pencetus idenya, yaitu senator Paul Sarbanes dan congressman Michael G. Oxley.

Sarbanes-Oxley memiliki enam komponen utama (W. Steve Albrecht, 2003), yaitu:

1. Implikasi bagi akuntan

Sarbanes-Oxley dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan dan mengembalikan tingkat kepercayaan investor. *Sarbanes-Oxley* memiliki tujuan untuk menjamin akuntabilitas dan kepastian (assurance) terkait dengan pengendalian internal yang mendukung pengambilan keputusan perusahaan, pelaporan keuangan serta pencegahan terjadinya manipulasi. Melalui *Sarbanes-Oxley* maka dibentuk suatu badan yang bernama *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)*. *PCAOB* ini merupakan suatu badan yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap profesi akuntan. Anggota *PCAOB* terdiri dari lima orang, dimana dari kelima orang tersebut hanya boleh ada dua orang yang memiliki latar belakang sebagai akuntan publik.

PCAOB bertugas melakukan pendaftaran kantor akuntan publik dan menetapkan atau mengadopsi standar mengenai audit, etika profesi, kendali mutu, dan independensi profesi akuntan publik. Selain itu badan ini juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan, investigasi, menegakkan tindakan disiplin terhadap kantor akuntan publik serta menegakkan kepatuhan terhadap undang-undang ini.

Setiap kantor akuntan publik, baik itu yang ada di Amerika Serikat, ataupun yang ada di luar negeri yang ikut serta dalam penyiapan dan penerbitan laporan audit perusahaan publik wajib terdaftar pada *PCAOB*. Melalui kewajiban ini, setiap kantor akuntan publik yang terdaftar diwajibkan memelihara kertas kerja audit dan informasi serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan laporan audit minimal tujuh tahun.

Setiap kantor akuntan publik yang terdaftar juga tidak diperbolehkan memberikan jasa non audit kepada kliennya. Jasa non audit yang dilarang meliputi : jasa akuntan dan penyiapan laporan keuangan, perancangan dan implementasi sistem informasi, jasa penilaian, jasa aktuarial, jasa outsourcing internal audit, jasa legal, jasa expert yang tidak berkaitan dengan audit, serta jasa lain yang dilarang oleh *PCAOB*. Pemberian jasa non audit yang tidak dilarang kepada klien hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan lebih dahulu dari komite audit.

2. Implikasi bagi perusahaan

Dengan adanya *Sarbanes-Oxley*, manajemen perusahaan diharuskan untuk mensertifikasi kewajaran laporan keuangan dan pengungkapan yang dibuat dalam laporan berkala, laporan keuangan, dan pengungkapan pengungkapan secara wajar menyajikan segala hal yang material, operasi dan kondisi keuangan issuer. Manajemen juga diharuskan memberikan pengendalian intern dan auditor eksternal melaporkan pengendalian tersebut, dan manajemen juga diharuskan melaporkan efektivitas pengendalian intern dan auditor menyajikannya dalam penilaian manajemen. Hal lain yang terkait dengan implikasi *Sarbanes-Oxley* yang terkait dengan perusahaan, yaitu :

- Perusahaan publik harus memiliki kode etik bagi pejabat.
- Memasukkan syarat pembatalan bonus apabila ditemukan kecurangan.
- Pembatasan memberikan pinjaman kepada pejabat dan direktur.
- Memasukkan blackout period untuk trading bagi pejabat dan direktur.
- Mengharuskan memiliki komite audit yang lebih kuat.
- Mengharuskan satu dari anggota komite audit adalah ahli keuangan.

3. Implikasi bagi analis saham/surat berharga

The National Security Exchange dan asosiasi sekuritas terdaftar harus menetapkan peraturan benturan kepentingan untuk analisis riset yang merekomendasikan ekuitas dalam laporan riset.

4. Implikasi bagi pengacara

Security Exchange Commission (SEC) akan menetapkan peraturan yang menetapkan standar minimum perilaku profesional untuk praktek kepengacaraan. \

5. Bagian lain dari *Sarbanes-Oxley*

Memberikan upaya-upaya hukum terkait dengan diberlakukannya *Sarbanes-Oxley* ini.

6. Ancaman dan perselisihan tersembunyi

Membahas tentang apa saja dampak yang ditimbulkan atas penerapan *Sarbanes-Oxley* ini. Di antaranya adalah : (1) potensi kerugian dari private sektor audit standard setting untuk audit perusahaan publik (2) isu ketaatan internasional (3) potensi keterbatasan lebih jauh atas jasa non audit yang lain.

Komponen *Sarbanes-Oxley Act*

Sarbanes-Oxley terdiri dari sebelas judul yang mengatur mengenai perlindungan investor dilihat dari sisi pelaku bisnis. Dari kesebelas judul tersebut masih dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa section. Berikut kesebelas judul yang tertuang dalam *Sarbanes-Oxley* :

- *Title I – Public Company Accounting Oversight Board*
- *Title II – Auditor Independence*
- *Title III – Corporate Responsibility*
- *Title IV – Enhanced Financial Disclosure*
- *Title V – Conflict of Interest*
- *Title VI – Commission Resources and Authority*
- *Title VII – Studies and Report*
- *Title VIII – Corporate and Criminal Fraud Accountability*
- *Title IX – White-Collar Crime Penalty Enhancements*
- *Title X – Corporate Tax Returns*
- *Title XI – Corporate Fraud and Accountability*

Dari kesebelas judul ini, tidak semuanya digunakan oleh setiap perusahaan. Beberapa judul yang digunakan oleh hampir keseluruhan perusahaan adalah judul *III (Corporate Responsibility)*, judul *IV (Enhanced Financial Disclosure)*, dan judul *IX (White-Collar Crime Penalty Enhancements)*.

Title III – Corporate Responsibility

Dalam judul ini, terutama dalam section 302, setiap pejabat yang berwenang atas pembuatan laporan keuangan dalam perusahaan, yaitu direktur utama dan direktur keuangan diwajibkan untuk melaporkan sertifikasi triwulanan dan tahunan kepada SEC, termasuk pengendalian dan prosedur pengungkapan.

Title IV – Enhanced Financial Disclosures

Dalam judul ini, terutama dalam section 404, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan efektivitas prosedur dan pengendalian internal dalam rangka pelaporan keuangan (internal control over financial reporting), bersama dengan atestasi dari auditor eksternal mengenai laporan tersebut.

Title IX – White-Collar Crime Penalty Enhancements

Dalam judul ini, direktur utama dan direktur keuangan diwajibkan untuk dapat memastikan laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan Securities Exchange Act of 1934, dan akan terkena hukuman/penalti jika laporan keuangan yang dibuat ternyata salah. Berikut ini kerangka penuh dari *Sarbanes-Oxley Act 2002*

Title I – Public Company Accounting Oversight Board

Sec. 101. Establishment; administrative provisions

Sec. 102. Registration with the Board

Sec. 103. Auditing, quality control, and independence standards and rules

Sec. 104. Inspectors of registered public accounting firms

Sec. 105. Investigations and disciplinary proceedings

Sec. 106. Foreign public accounting firms

Sec. 107. Commission oversight of the board

Sec. 108. Accounting standards

Sec. 109. Funding

Title II – Auditor Independence

Sec. 201. Services outside the scope of practice of auditors

Sec. 202. Preapproval requirements

Sec. 203. Audit partner rotation

Sec. 204. Auditor reports to audit committees

Sec. 205. Conforming amendments

Sec. 206. Conflicts of interest

Sec. 207. Study of mandatory rotation of registered public accounting firms

Sec. 208. Commission authority

Sec. 209. Considerations by appropriate State regulatory authorities

Title III – Corporate Responsibility

Sec. 301. Public company audit committees

Sec. 302. Corporate responsibility for financial reports

Sec. 303. Improper influence on conducts of audit

Sec. 304. Forfeiture of certain bonuses and profits

Sec. 305. Officer and director bars and penalties

Sec. 306. Insider trades during pension fund blackout periods

Sec. 307. Rules of professional responsibility for attorneys

Sec. 308. Fair fund for investor

Title IV – Enhanced Financial Disclosure

Sec. 401. Disclosures in periodic reports

Sec. 402. Enhanced conflict of interest provisions

Sec. 403. Disclosures of transactions involving management and principal stockholders

Sec. 404. Management assessment of internal controls

Sec. 405. Exemption

Sec. 406. Code of ethics for senior financial officers

Sec. 407. Disclosure of audit committee financial expert

Sec. 408. Enhanced review of periodic disclosures by issuers

Sec. 409. Real time issuer disclosures

Title V – Analysis Conflict of Interest

Sec. 501. Treatment of securities analysts by registered securities associations and national securities exchanges

Title VI – Commission Resources and Authority

Sec. 601. Authorization of appropriations

Sec. 602. Appearance and practice before Commission

Sec. 603. Federal court authority to impose penny stock bars

Sec. 604. Qualifications of associated persons of brokers and dealers

Title VII – Studies and Report

Sec. 701. GAO study and report regarding consolidation of public accounting firms

Sec. 702. Commission study and report regarding credit rating agencies

Sec. 703. Study and report on violators and violations

Sec. 704. Study of enforcement actions

Sec. 705. Study of investment banks

Title VIII – Corporate and Criminal Fraud Accountability

Sec. 801. Short title

Sec. 802. Criminal penalties for altering documents

Sec. 803. Debts nondischargeable if incurred in violation of securities fraud laws

Sec. 804. Statute of limitations for securities fraud

Sec. 805. Review of Federal Sentencing Guidelines for obstruction of justice and extensive criminal fraud

Sec. 806. Protection for employees of publicly traded companies who provide evidence of fraud

Sec. 807. Criminal penalties for defrauding shareholders of publicly traded companies

Title IX – White-Collar Crime Penalty Enhancements

Sec. 901. Short title

Sec. 902. Attempts and conspiracies to commit criminal fraud offenses

Sec. 903. Criminal penalties for mail and wire fraud

Sec. 904. Criminal penalties for violations of the Employee Retirement Income Security

Sec. 905. Amendment to sentencing guidelines relating to certain white-collar offenses

Sec. 906. Corporate responsibility for financial reports

Title X – Corporate Tax Returns

Sec. 1001. Sense of the Senate regarding the signing of corporate tax returns by chief executive officers

Title XI – Corporate Fraud and Accountability

Sec. 1101. Short title

Sec. 1102. Tampering with a record or otherwise impeding an official proceeding

Sec. 1103. Temporary freeze authority for the Securities and Exchange Commission

Sec. 1104. Amendment to the Federal Sentencing Guidelines

Sec. 1105. Authority of the Commission to prohibit persons from serving as officers or directors

Sec. 1106. Increased criminal penalties under Securities Exchange Act of 1934

Sec. 1107. Retaliation against informants

Sarbanes-Oxley Act Section 302

Sarbanes-Oxley section 302 mengharuskan perusahaan menyertakan sertifikasi yang sesuai dengan section 302 di dalam laporan mereka, kemudian laporan tersebut dilaporkan pada SEC. Laporan sertifikasi tersebut harus ditandatangani oleh manajemen tertinggi di dalam perusahaan seperti *CEO (Chief Executive Officers)* dan *CFO (Chief Financial Officers)* dan tidak boleh diwakilkan kepada pihak manapun.

Section 302 Sarbanes-Oxley mengharuskan adanya sebuah prosedur internal yang dirancang secara khusus untuk memastikan pengungkapan keuangan yang akurat. Pejabat yang berwenang harus menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas pembentukan dan pengelolaan sistem pengendalian tersebut untuk memastikan bahwa informasi yang ada di dalam laporan terkait dengan perusahaan dan anak-anak perusahaan. Pada saat di mana laporan periodik sedang dipersiapkan, pejabat yang berwenang harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan dalam jangka waktu 90 hari sebelum laporan diterbitkan. Laporan tersebut kemudian menyajikan kesimpulan mereka mengenai efektivitas dari pengendalian internal berdasarkan evaluasi pada tanggal di atas di dalam laporan mereka.

Pejabat yang berwenang dalam organisasi tersebut diharuskan menjelaskan kepada auditor eksternal dan komite audit semua defisiensi yang signifikan dalam desain atau operasi dari pengendalian intern, dan setiap kecurangan yang terjadi apakah signifikan atau tidak yang melibatkan manajemen atau karyawan lain dan harus memberitahukan segala perubahan yang signifikan dari pengendalian intern setelah evaluasi pengendalian intern perusahaan. Laporan keuangan periodik harus memenuhi syarat berikut ini :

- Petugas yang menandatangani telah mengkaji laporan tersebut.
- Laporan tidak mengandung kalimat materiil yang tidak benar maupun kesalahan materiil yang dapat menyesatkan.

- Laporan keuangan dan informasi yang terkait mencerminkan kondisi keuangan dengan baik.
- Petugas yang menandatangani bertanggung jawab terhadap kontrol internal dan telah mengevaluasi kontrol internal ini 90 hari sebelumnya dan melaporkan temuan mereka.
- Ada daftar kelemahan dari kontrol internal dan informasi mengenai fraud yang melibatkan karyawan dan aktivitas internal.
- Perubahan signifikan pada kontrol internal dan faktor-faktor terkait yang dapat menghasilkan dampak negatif terhadap control internal.

Bentuk Sertifikasi

Peraturan-peraturan yang telah diungkapkan di atas memerlukan sertifikasi untuk pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Bentuk sertifikasi dari pengendalian intern tersebut tidak dijelaskan secara spesifik, akan tetapi poin-poin penting yang harus terdapat di dalam sertifikasi tersebut adalah :

1. Kelemahan material

Kelemahan material tersebut harus diungkapkan kepada komite audit dan auditor independen setiap triwulannya dan diberitahukan kepada masyarakat melalui laporan tahunan pengendalian intern.

2. Defisiensi yang signifikan

Kelemahan material tersebut harus diungkapkan kepada komite audit dan auditor independen setiap triwulannya, akan tetapi jika kelemahan yang terjadi tidak material maka tidak perlu diberitahukan kepada masyarakat melalui laporan tahunan pengendalian intern.

3. Kecurangan-kecurangan yang terjadi

Setiap kecurangan yang terjadi baik itu material ataupun tidak material tetap harus diungkapkan kepada komite audit dan auditor independen setiap triwulannya.

4. Perubahan yang signifikan

Poin-poin di atas yang telah dijelaskan tersebut membantu manajemen dalam menentukan pengendalian intern atas laporan keuangan, hal tersebut juga membantu manajemen menemukan beberapa kelemahan material yang terjadi terhadap pengendalian terhadap laporan keuangan. Pada poin “kelemahan material” dan “defisiensi yang signifikan”, kedua poin tersebut merupakan defisiensi dalam mendesain atau operasi dari pengendalian internal yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data yang merupakan pernyataan pihak manajemen. “Kelemahan material” merupakan defisiensi yang utama dibandingkan dengan “defisiensi yang signifikan”, karena pada dasarnya defisiensi yang signifikan tersebut dapat juga dikatakan sebagai kelemahan yang material dalam perusahaan yang mempengaruhi pengendalian internal atas laporan keuangan.

Sertifikasi tersebut haruslah sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan yang nantinya akan mempengaruhi laporan pengendalian internal. Susunan kata merupakan persyaratan dalam sertifikasi tersebut yang tidak dapat diganti, walaupun jika perubahan tersebut dibutuhkan.

Pertanggung Jawaban atas Sertifikasi Yang Tidak Sebenarnya

Walaupun *section 302* isinya dianggap di bawah *Exchange Act*, namun pada kenyataannya *section 302* tersebut memang merupakan subyek dari pertanggung jawaban perdata pada *section 18* di dalam *Exchange Act*. Hal tersebut secara otomatis langsung menjadi bagian dalam *Security Exchange*, yang kemudian lebih dijelaskan lagi dalam *section 18* tentang pertanggung jawaban yang terdapat dalam *Security Act*.

Pegawai yang menyediakan sertifikasi yang tidak sebenarnya (palsu) dapat dijadikan subyek dari SEC atas pelanggaran terhadap laporan yang diberikan sebagai syarat dari Exchange Act dan SEC, dan tindakan atas pelanggaran terhadap ketetapan fraud dalam hukum sekuritas yang terdapat dalam *Exchange Act*.

CEO dan CFO yang menandatangani laporan dalam perusahaan bisa saja memberikan pernyataan yang menyesatkan ataupun penghilangan data, namun dengan adanya standar anti fraud dan SEC, siapa saja yang melakukan tindakan tersebut, memberikan bantuan, atau bersekongkol untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan berarti mereka telah melanggar hukum sekuritas.

Keterkaitan Sarbanes-Oxley Section 302 dengan Section 404

Section 302 terkait erat dengan *section 404*, terutama dalam 2 hal di bawah ini, yaitu :

- Pertama, pengendalian internal atas laporan keuangan (dibahas dalam *section 404*) merupakan sekumpulan prosedur dan pengendalian atas pengungkapan dalam laporan tahunan (dibahas dalam *section 302*). SEC telah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan perusahaan yang menyusun laporan tahunan untuk mengelola dan secara reguler melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal yang dibuat untuk memastikan informasi yang dilaporkan dalam laporan dicatat, diproses, dan disimpulkan serta dilaporkan dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang telah didefinisikan oleh SEC, prosedur dan pengendalian pengungkapan (*disclosure control and procedure*) ditujukan pada informasi keuangan baik yang material maupun yang tidak material yang harus dicantumkan dalam laporan tahunan supaya para investor dapat mengetahui bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya. Definisi ini jauh lebih luas daripada definisi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Untuk memperluas definisi bahwa pengendalian internal atas pelaporan keuangan memiliki dampak terhadap pengungkapan, prosedur, dan pengendalian. Pengungkapan perusahaan termasuk dalam pengendalian karena pengendalian pengungkapan ditujukan kepada seluruh informasi keuangan baik yang material maupun yang tidak material, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, materialitas mengarah pada informasi yang dibutuhkan oleh investor di dalam pengambilan keputusan. Pembatasan mana yang material dan mana yang tidak material sama pentingnya bagi informasi keuangan maupun informasi non keuangan.
- Kedua, pesan yang dapat ditarik dari adanya bagian pelaporan kepada public di dalam *Sarbanes-Oxley* dan peraturan yang telah ditetapkan oleh SEC adalah bahwa aktivitas pengungkapan dan pelaporan sudah tidak bisa dilakukan dengan seenaknya, melainkan harus berdasarkan pada kedua peraturan di atas. Proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal yang terkait harus dapat dilakukan secara konsisten, didefinisikan dengan jelas, dan diatur dengan efektif. Proses untuk menghasilkan informasi non keuangan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan juga diharapkan untuk dapat diseragamkan dan konsisten dengan pendekatan berbasis proses (*process based approach*).

Dalam melakukan sertifikasi, orang yang berwenang dalam perusahaan (seperti CEO dan CFO), juga menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan mengenai perusahaan terkait dengan segala macam informasi yang material bagi para investor. Mereka harus memberikan sertifikasi atas proses manajemen internal, maka itu evaluasi terhadap pengendalian internal atas laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting terhadap proses sertifikasi yang dilakukan eksekutif perusahaan (CEO dan CFO).

Fraudulent Financial Reporting

Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk dari akuntansi. Laporan keuangan berisi informasi-informasi dari sebuah entitas. Dari laporan keuangan inilah pihak-pihak berkepentingan, baik internal maupun eksternal dapat mengetahui posisi keuangan, kinerja, maupun keadaan sumber daya entitas. Laporan keuangan menurut Kiesso, Weygandt, dan Kimmel (2002: 3) adalah sebagai berikut:

“Financial statements are the principal means through which financial information is communicated to those outside an enterprise. These statements provide the firm’s history quantified in money terms.”

Laporan keuangan merupakan informasi utama bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak luar perusahaan, mengenai dampak keuangan dari berbagai transaksi dan peristiwa lain yang terjadi pada suatu perusahaan. Laporan keuangan disajikan dalam satuan mata uang tertentu. Laporan keuangan merupakan media komunikasi antara pihak intern perusahaan dengan pihak ekstern yang berkepentingan. Dalam konteks ini pihak intern meliputi pihak manajemen serta pihak-pihak lain dalam perusahaan yang berkepentingan, misalnya karyawan. Pihak ekstern lainnya yang berkepentingan, misalnya investor dan kreditor.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan (*Financial statements*) merupakan sarana utama dalam mengkomunikasikan informasi keuangan yang disediakan oleh proses pelaporan keuangan (*Financial Reporting*). *Financial Accounting Standard Board (FASB)* menggunakan istilah pelaporan keuangan (*Financial Reporting*) untuk ruang lingkup yang lebih luas daripada istilah-istilah laporan keuangan (*Financial Statements*). Pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan dan cara-cara lain dalam melaporkan informasi, misalnya prospectus, informasi keuangan segmen industri dan geografi, pengungkapan pengaruh perubahan harga, dan sebagainya.

Sementara itu, tujuan laporan keuangan adalah (Ikatan Akuntan Indonesia 2004:1,2, para.05) :

“... memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan meliputi; (a) aktiva, (b) kewajiban, (c) ekuitas, (d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, dan (e) arus kas. Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastiannya. Diperolehnya kas dan setara kas.”

Komponen dan Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar. Menurut karakteristik ekonominya, kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran laporan keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas, yang kesemuanya tercantum dalam neraca. Unsur yang berkaitan dengan kinerja dalam laporan laba-rugi adalah penghasilan dan beban.

Dalam pernyataan standar laporan keuangan no.1 mengenai penyajian laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menetapkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penyebab *Fraudulent Financial Reporting*

Kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) dapat didefinisikan suatu perilaku yang disengaja, baik dengan tindakan atau penghapusan, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (bias). *Fraudulent financial reporting* merupakan problem yang dapat terjadi di perusahaan mana saja dan kapan saja. *Fraudulent financial reporting* yang terjadi pada suatu perusahaan memerlukan perhatian khusus dari akuntan publik (auditor independen). (Muh. Arief Effendi, Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan, Akuntan Indonesia, Edisi No.6, Tahun II, Maret 2008, hal.36-40)

Pengertian *fraudulent financial reporting* menurut Arens dalam bukunya *Auditing & Assurance Services An Integrated Approach* (2008 : 338) adalah sebagai berikut :

“Fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive users. Most cases of fraudulent financial reporting involve the intentional misstatement of amounts not disclosures. For example, WorldCom is reported to have capitalized as fixed asset, billions dollars that should have been expensed. Omission of amounts are less common, but a company can overstate income by omitting account payable and other liabilities. Although less frequent, several notable cases of fraudulent financial reporting involved adequate disclosure. For example, a central issue in the Enron case was whether the company had adequately disclosed obligations to affiliates known as special purpose entities.”

Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan yang disajikan berikut ini : Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan. *Fraudulent financial reporting* juga dapat disebabkan adanya kolusi antara manajemen perusahaan dengan akuntan publik. Salah satu upaya untuk mencegah timbulnya kolusi tersebut, yaitu perlunya perputaran (rotasi) akuntan publik dalam melakukan general audit suatu perusahaan. Carcello dalam artikelnya yang berjudul *Audit Firm Tenure And Fraudulent Financial Reporting (2004)*, menyatakan :

“The Sarbanes-Oxley Act (U.S. House of Representatives 2002) required the U.S. Comptroller General to study the potential effects of requiring mandatory audit firm rotation. The U.S. General Accounting Office (GAO) concludes in its recently released study of mandatory audit firm rotation that “mandatory audit firm rotation may not be the most efficient way to strengthen auditor independence” (GAO 2003, Highlights). However, the GAO also suggests that mandatory audit firm rotation could be necessary if the Sarbanes-Oxley Act’s requirements do not lead to improved audit quality (GAO 2003, 5).”

Berdasarkan hasil penelitian COSO (1999) yang berjudul *Fraudulent Financial Reporting : 1987 – 1997, An Analysis of U.S. Public Company*, atas perusahaan yang listing di *Securities Exchange Commission (SEC)* selama periode Januari 1987 - Desember 1997 dapat disimpulkan bahwa teridentifikasi sejumlah 300 perusahaan (sekitar 50%) yang terdapat

fraudulent financial reporting. Hasil analisa perusahaan yang terkategori *fraudulent financial reporting* memiliki karakteristik yaitu mengalami permasalahan bidang keuangan (*experiencing financial distress*), *tax oversight* dan terdapat fraud dengan jumlah uang yang besar (*ongoing, large-dollar frauds*). Beberapa perusahaan yang termasuk kasus / skandal *fraudulent financial reporting* antara lain Enron, Tyco, Adelphia dan WorldCom. Menurut KPMG dalam *Fraud Survey 2003* faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan dalam perusahaan di antaranya sebagai berikut (dalam persentase di tahun 2003) :

- *Colussion between employees and third parties* : 48
- *Inadequate internal controls* : 39
- *Management override of internal controls* : 31
- *Colussion between employees and management* : 15
- *Lack of control over management by directors* : 12
- *Ineffective or nonexistent ethics or compliance program* : 10

Sedangkan kondisi yang dapat meyebabkan terjadinya fraud dalam perusahaan menurut Arens dalam bukunya *Auditing & Assurance Services An Integrated Approach* (2008 : 340) adalah sebagai berikut :

1. Tekanan/Insentif

Manajemen atau karyawan lain disuap atau ditekan untuk melakukan kecurangan.

2. Kesempatan/Peluang

Kondisi yang menyebabkan terjadinya peluang bagi manajemen dan karyawan untuk melakukan *fraud*

3. Sikap/Etika

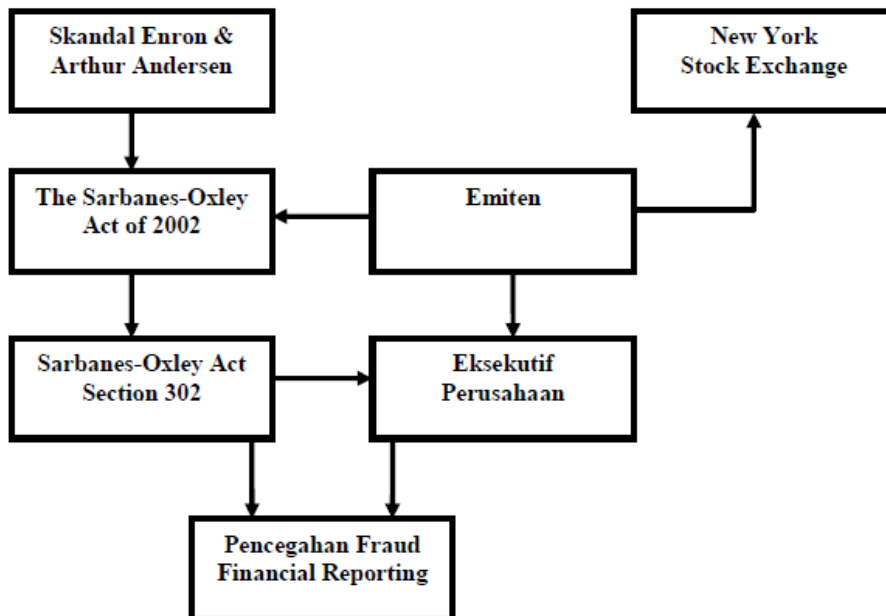
Sikap, karakter, dan nilai budaya yang dianut oleh perusahaan yang memungkinkan manajemen untuk melakukan tindakan yang tidak jujur.

Kerangka Pemikiran

Sarbanes-Oxley dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dari manajemen perusahaan publik, memperbaiki tata kelola perusahaan, meningkatkan pengawasan (*oversight*) dari kantor akuntan publik dan merestorasi kepercayaan investor dalam pasar modal. *Sarbanes-Oxley* meliputi beberapa hal antara lain seperti, pendirian *Public Company Accounting Oversight Board*, independensi auditor, serta peningkatan dalam hal pengungkapan di dalam laporan keuangan.

Dalam salah satu pasalnya, yaitu section 302, disebutkan bahwa eksekutif perusahaan diharuskan untuk memberikan sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan. sertifikasi tersebut harus ditandatangani oleh manajemen tertinggi di dalam perusahaan seperti CEO (*Chief Executive Officers*) dan CFO (*Chief Financial Officers*) dan tidak boleh diwakilkan kepada pihak manapun. Selain itu, pihak yang berwenang harus menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas pembentukan dan pengelolaan sistem pengendalian tersebut untuk memastikan bahwa informasi yang ada di dalam laporan terkait dengan perusahaan dan anak-anak perusahaan. Pada saat di mana laporan periodik sedang dipersiapkan, pejabat yang berwenang harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan dalam jangka waktu 90 hari sebelum laporan diterbitkan. Laporan tersebut kemudian menyajikan kesimpulan mereka mengenai efektivitas dari pengendalian internal berdasarkan evaluasi pada tanggal di atas di dalam laporan mereka. Penting sekali bagi eksekutif perusahaan untuk memiliki pengetahuan yang mendasar mengenai auditing dan pengungkapan laporan keuangan sebelum mereka dapat mensertifikasi laporan keuangan tahunan perusahaan. Dalam melakukan sertifikasi, orang yang berwenang dalam perusahaan (seperti CEO dan CFO), juga menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan mengenai perusahaan terkait dengan segala macam informasi yang material bagi para investor. *Sarbanes-Oxley* salah satu tujuannya adalah untuk

mencegah terjadinya fraud financial reporting dan fraud auditing. Sarbanes-Oxley harus dipatuhi dalam rangka memenuhi kewajiban SEC apabila perusahaan memutuskan untuk listing di NYSE (*New York Stock Exchange*).



Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang telah diungkapkan di atas, maka diajukan hipotesis kerja sebagai berikut:

1. Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh positif terhadap peranan eksekutif perusahaan.
2. Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting.
3. Peranan eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting.
4. Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangka mencegah fraudulent financial reporting.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1998 : 66). Menurut Guy (2004), kegiatan dalam penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data dalam rangka pengujian hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1998 : 66). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Pada bagian lain, Nazir mengemukakan bahwa keunggulan dari penelitian deskriptif antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dapat meliputi lebih banyak segi dibandingkan dengan metode-metode penelitian lainnya.

2. Telah digunakan secara luas dan dapat diterapkan pada berbagai macam permasalahan.
3. Banyak memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan melalui pemberian informasi keadaan mutakhir.
4. Membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna untuk pelaksanaan penelitian.
5. Metode ini dapat digunakan dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus, mengambil kutipan dari Nazir studi kasus yaitu penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Yang menjadi subjek penelitian dapat individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Hasil dari penelitian studi kasus merupakan suatu generalisasi dari pola kasus yang tipikal dari individu atau lembaga yang diteliti.

Populasi dan Sampel

Dalam sebuah penelitian, proses yang pertama dilakukan adalah menentukan populasi. Menurut Arikunto (1998 : 115) yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian disebut unit analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah divisi pengguna (users) terkait penerapan Sarbanes-Oxley Act 2002. Unit analisis penelitian ini sama dengan populasinya yaitu divisi pengguna terkait penerapan Sarbanes-oxley Act 2002, yaitu sebanyak 46 orang yang berada di divisi accounting (akuntansi).

Operasionalisasi Variabel

Agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka terdapat tiga variabel yang digunakan. Variabel-variabel tersebut adalah :

1. Variabel independen (X), yaitu suatu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, sebaliknya variabel ini akan mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sarbanes-Oxley Act section 302.
2. Variabel dependen (Y), yaitu variabel yang keberadaannya merupakan suatu yang dipengaruhi atau dihasilkan oleh variabel independen. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah peranan eksekutif perusahaan (Y1) dan *Fraudulent financial reporting* (Y2). Untuk mengukur ketiga variabel ini dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden dengan menggunakan ukuran skala ordinal. Adapun secara rinci operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

Uji Validitas

Suatu data dikatakan valid apabila diukur dengan alat yang tepat. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan benar-benar dapat mengukur variabel yang dimaksud (Arikunto, 1998 : 136). Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya construct sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti (Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 1999 : 181). Dalam penelitian ini, uji

validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dalam kuesioner dapat mengukur variabel sebagaimana yang kita inginkan. Validitas pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dapat diukur dengan mengkorelasikan skor tetap pertanyaan dengan jumlah skor totalnya. Dalam hal ini pertanyaan yang memiliki koefisien korelasi terhadap skor total lebih kecil dari nilai kritisnya berarti tidak lolos uji validitas dan harus diperbaiki atau dibuang. Untuk menguji validitas, maka dihitung koefisien korelasi antara masing-masing skor total dengan menggunakan rumus koefisien korelasi (r) Pearson. Koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibuat nilainya. Kriteria yang dikemukakan menurut Sugiyono (2001 : 124) yaitu :

- Jika $r \geq 0,30$ maka item-item kuesioner valid.
- Jika $r < 0,30$ maka item-item kuesioner tidak valid.

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas berdasarkan koefisien korelasi dilakukan dengan menggunakan SPSS 13.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel Sarbanes-Oxley section 302

Uji Validitas Variabel Sarbanes-Oxley Section 302

Correlations

		SO
v1	Pearson Correlation	,941**
	Sig. (2-tailed)	,000
v2	Pearson Correlation	,849**
	Sig. (2-tailed)	,000
v3	Pearson Correlation	,925**
	Sig. (2-tailed)	,000
v4	Pearson Correlation	,894**
	Sig. (2-tailed)	,000
v5	Pearson Correlation	,914**
	Sig. (2-tailed)	,000
v6	Pearson Correlation	,946**
	Sig. (2-tailed)	,000
SO	Pearson Correlation	1

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Berdasarkan hasil pengujian validitas dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan mempunyai nilai $r > 0,30$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner Sarbanes-Oxley section 302 sudah valid secara statistik.

2. Variabel Peranan Eksekutif Perusahaan

Uji Validitas Variabel Peranan Eksekutif Perusahaan

Correlations

		EXE
v7	Pearson Correlation	,616**
	Sig. (2-tailed)	,000
v8	Pearson Correlation	,856**
	Sig. (2-tailed)	,000
v9	Pearson Correlation	,888**
	Sig. (2-tailed)	,000
v10	Pearson Correlation	,913**
	Sig. (2-tailed)	,000
v11	Pearson Correlation	,884**
	Sig. (2-tailed)	,000
v12	Pearson Correlation	,897**
	Sig. (2-tailed)	,000
v13	Pearson Correlation	,852**
	Sig. (2-tailed)	,000
EXE	Pearson Correlation	1

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Berdasarkan hasil pengujian validitas dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan mempunyai nilai $r > 0,30$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner peranan eksekutif perusahaan sudah valid secara statistik.

3. Variabel Fraudulent Financial Reporting

Berdasarkan hasil pengujian validitas dalam tabel berikut ini, dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan mempunyai nilai $r > 0,30$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner fraudulent financial reporting sudah valid secara statistik.

Uji Validitas Variabel *Fraudulent Financial Reporting*

Correlations

		FF
v14	Pearson Correlation	,838**
	Sig. (2-tailed)	,000
v15	Pearson Correlation	,814**
	Sig. (2-tailed)	,000
v16	Pearson Correlation	,869**
	Sig. (2-tailed)	,000
v17	Pearson Correlation	,746**
	Sig. (2-tailed)	,000
v18	Pearson Correlation	,841**
	Sig. (2-tailed)	,000
v19	Pearson Correlation	,814**
	Sig. (2-tailed)	,000
v20	Pearson Correlation	,902**
	Sig. (2-tailed)	,000
FF	Pearson Correlation	1

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak (Arikunto, 1998 : 144). Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliable). Tingkat reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Jika alat ukur menggunakan skala yang skornya bukan 0-1, tetapi merupakan rentangan antara beberapa nilai, misalnya skala Likert, dapat menggunakan prosedur dari Cronbach yang dikenal sebagai teknik Cronbach's alpha (Umar Husein, 2002:119-123). Besar koefisien ini dihitung dengan menggunakan rumus :

$$r_{ii} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

dimana:

r_{ii} = reliabilitas instrumen.

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal.

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ_t^2 = varians total

Jika koefisien reliabilitas (alpha Cronbach) E 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur suatu dimensi adalah reliable (Hair, 1998:118).

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas berdasarkan koefisien Cronbach's alpha dilakukan dengan menggunakan SPSS 13.0, hasil uji reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Variabel Sarbanes-Oxley section 302

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dalam tabel 3.5 di bawah ini, dapat dilihat bahwa nilai koefisien sama dengan 0,958. Nilai koefisien ini lebih besar dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner Sarbanes-Oxley section 302 sudah reliable secara statistik.

Uji Reliabilitas Variabel Sarbanes-Oxley Section 302

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,958	6

2. Variabel Peranan Eksekutif Perusahaan

Uji Reliabilitas Variabel Peranan Eksekutif Perusahaan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,921	7

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien Cronbach's alpha mempunyai nilai sama dengan 0,921 dan lebih besar dari 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner peranan eksekutif perusahaan adalah reliable secara statistik.

3. Variabel Fraudulent Financial Reporting

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dalam berikut ini, dapat dilihat bahwa seluruh nilai koefisien Cronbach's alpha adalah sama dengan 0,924 dan lebih besar dari nilai batas 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner Fraudulent Financial Reporting adalah reliable secara statistik.

Uji Reliabilitas Variabel *Fraudulent Financial Reporting*

Reliability Statistics

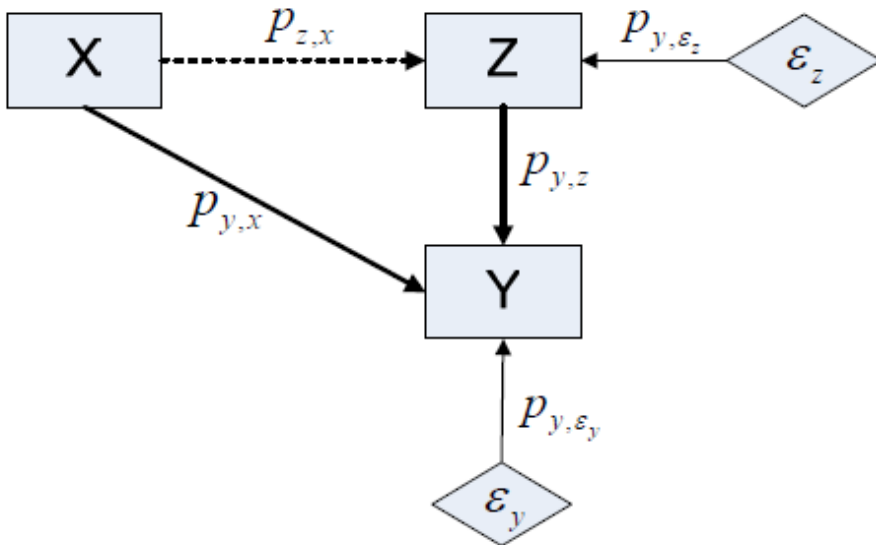
Cronbach's Alpha	N of Items
,924	7

Analisis Data

Analisis statistik digunakan untuk mencari keeratan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, juga untuk menguji parameternya. Analisis statistic yang digunakan penulis adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen terhadap variabel dependen. Dari persamaan tersebut dapat diketahui besarnya kontribusi variabel X (independen) terhadap variabel Y1 dan Y2 (dependen).

Analisis Jalur

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penulisan dan hipotesis, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis jalur (path analysis). Analisis ini bertujuan untuk menentukan besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, baik itu pengaruh yang sifatnya secara langsung atau tidak langsung serta mengukur besarnya pengaruh dari suatu variabel penyebab ke variabel akibat yang disebut dengan koefisien jalur. Menurut Bachrudin & L. Tobing (2003:34), aspek teoritis analisis jalur sama dengan aspek teoritis dalam analisis regresi klasik, sehingga asumsi-asumsi regresi klasik terikat pada analisis jalur tersebut. Sebelum mengambil kesimpulan mengenai hubungan kausal dalam jalur, maka terlebih dahulu diuji keberartian (signifikansi) setiap koefisien jalur yang telah dihitung. Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram jalur berikut:



Variabel X pada gambar tersebut merupakan variabel eksogen. Garis lurus dengan satu kepala panah merupakan hubungan bersifat kausalitas, misalnya variabel X terhadap Z. Variabel Z dan Y dikenal sebagai endogen. Kedua variabel endogen selalu terikat kekeliruan, dalam hal ini dinotasikan ϵ_z dan ϵ_y yang merupakan variabel residu gabungan dari variabel lain diluar X yang mungkin mempengaruhi Z dan Y tetapi tidak dimasukkan ke dalam model atau yang belum teridentifikasi oleh teori. Besarnya pengaruh dari satu variabel ke variabel lain dinyatakan dengan suatu koefisien p. Misalnya, besarnya pengaruh X terhadap Y dinotasikan dengan $p_{y,x}$. Taksiran koefisien jalur diberikan oleh (Bachrudin & L. Tobing, 2003:34):

$$\hat{p}_{yx_i} = b_i \frac{s_{x_i}}{s_y}, \quad i = 1, 2, \dots, p$$

Dimana:

- p_{yx_i} : koefisien jalur dari variabel penyebab (x) ke variabel akibat (y)
- b_i : koefisien regresi, diperoleh melalui analisis regresi biasa.
- s_{x_i} : simpangan baku variabel x
- s_y : simpangan baku variabel y

Koefisien jalur dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menggambarkan diagram hubungan antara variabel secara lengkap, diagram jalur mencerminkan hipotesis konseptual yang diajukan sehingga tampak dengan jelas variabel penyebab dan variabel akibat.

2) Menghitung koefisien jalur.

3) Menghitung koefisien korelasi.

Berdasarkan diagram jalur pada gambar sebelumnya, struktur variabel tersebut dapat dinyatakan ke dalam dua persamaan regresi, yaitu:

$$z_i = p_{z,x}x + e_z$$

Dimana:

Z : Variabel peranan eksekutif perusahaan.

x : Variabel Sarbanes-Oxley.

$p_{z,x}$: Koefisien jalur dari variabel Sarbanes-Oxley (x) ke variabel peranan eksekutif perusahaan (z). Koefisien ini dihitung dengan rumus seperti pada persamaan di atas, yaitu:

$$p_{z,x} = b_z \frac{s_x}{s_z}$$

dengan:

$$b_z = \frac{n \sum xz - (\sum x)(\sum z)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$s_x = \frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}$$

$$s_z = \frac{n \sum z^2 - (\sum z)^2}{n(n-1)}, \text{ n adalah jumlah sampel}$$

e_z : Residu

$$y = p_{y,x}x + p_{y,z}z + \varepsilon_y$$

Y : Variabel Fraudulent Financial Reporting.

Z : Variabel Peranan Eksekutif Perusahaan.

X : Variabel Sarbanes-Oxley Act Section 302.

$p_{y,x}$: Koefisien jalur dari variabel Sarbanes-Oxley (x) ke variabel Fraudulent (y). Koefisien ini dihitung dengan rumus seperti pada persamaan di atas, yaitu:

$$p_{y,x} = b_y \frac{s_x}{s_y} + e_y$$

$$\text{dengan: } b_y = \frac{(\sum z^2)(\sum xy) - (\sum xz)(\sum zy)}{(\sum x^2)(\sum z^2) - (\sum xz)^2}$$

$$s_x = \frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}$$

$$s_y = \frac{n \sum y - (\sum y)^2}{n(n-1)}$$

, n adalah jumlah sampel.

$P_{y,z}$: Koefisien jalur dari variabel peranan eksekutif perusahaan (z) ke variabel Fraudulent (y). Koefisien ini dihitung dengan rumus seperti pada persamaan sebelumnya, yaitu:

$$p_{y,z} = b_y \frac{s_z}{s_y} + e_y$$

$$\text{dengan: } b_y = \frac{(\sum z^2)(\sum xy) - (\sum xz)(\sum zy)}{(\sum x^2)(\sum z^2) - (\sum xz)^2}$$

$$s_z = \frac{n \sum z - (\sum z)^2}{n(n-1)}$$

$$s_y = \frac{n \sum y - (\sum y)^2}{n(n-1)}$$

, n adalah jumlah sampel.

e_y : Residu

Persamaan ke 2 dan 3 dikenal dengan istilah standardized regression dan koefisien regresinya disebut koefisien regresi parsial standardized, dalam analisis jalur disebut koefisien jalur. Koefisien korelasi (r) dapat dihitung dari nilai koefisien jalur dengan menggunakan the first law , yaitu:

$$r_{z,x} = p_{z,x}$$

$$r_{y,x} = p_{y,x}$$

$$r_{y,z} = p_{y,z} + p_{y,x}p_{z,x}$$

Setelah nilai koefisien korelasi diperoleh, selanjutnya dibuat matriks korelasi R dengan bentuk matriks sebagai berikut:

$$\hat{\mathbf{R}} = \begin{bmatrix} r_{xx} & r_{zx} & r_{yx} \\ r_{zx} & r_{zz} & r_{yz} \\ r_{yx} & r_{yz} & r_{yy} \end{bmatrix}$$

Dengan menggunakan koefisien korelasi, koefisien determinasi multiple masing-masing persamaan regresi dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$R_{zx}^2 = (r_{zx})^2, \text{ untuk persamaan ke 2}$$

$$R_{y,zx}^2 = \frac{(r_{yz})^2 + (r_{yx})^2 - 2r_{yz}r_{yx}r_{zx}}{1 - (r_{zx})^2}, \text{ untuk persamaan ke 3}$$

Dari nilai koefisien determinasi ini dapat diketahui nilai koefisien jalur untuk residual masing-masing persamaan, dengan rumus:

$$p_{ze_z} = \sqrt{1 - R_{zx}^2}$$

$$p_{ye_y} = \sqrt{1 - R_{y,zx}^2}$$

Terdapat dua koefisien determinan lagi yaitu koefisien determinan multiple yang diberi notasi R_m^2 untuk model yang diusulkan dan M untuk model setelah terdapat koefisien jalur yang tidak signifikan (Bachrudin & L. Tobing, 2003:37). Koefisien determinasi multipel tersebut adalah:

$$M = R_m^2 = 1 - (1 - R_{y_1x}^2)(1 - R_{y_2 \cdot y_1x}^2)$$

Pengujian Hipotesis

1) Pengujian secara individual

Koefisien jalur yang telah diperoleh perlu diuji keberartiannya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Menurut Schumacker & Lomax (1996), uji signifikansi untuk koefisien jalur sama seperti pada uji koefisien regresi biasa dengan menggunakan uji-t (Bachrudin & Tobing, 2003:36).

- a. Pengaruh penerapan Sarbanes-Oxley *section 302* terhadap peranan eksekutif perusahaan.

Hipotesis penelitian : Penerapan Sarbanes-Oxley *section 302* berpengaruh positif terhadap peranan eksekutif perusahaan.

Hipotesis statistik : $H_0 : \rho_{zx} = 0$

$H_1 : \rho_{zx} > 0$

Statistik uji : $t = \frac{\rho_{zx}}{s_{\rho_{zx}}}$

Kriteria penolakan : H_0 ditolak jika $t > t_{(1-\alpha)(n-2)}$

- b. Pengaruh penerapan Sarbanes-Oxley *section 302* terhadap *fraudulent financial reporting*.

Hipotesis penelitian : Penerapan Sarbanes-Oxley berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.

Hipotesis statistik : $H_0 : \rho_{yx} = 0$

$H_1 : \rho_{yx} > 0$

Statistik uji : $t = \frac{p_{yx}}{s_{p_{yx}}}$

Kriteria penolakan : H_0 ditolak jika $t > t_{(1-\alpha)(n-2)}$

c. Pengaruh peranan eksekutif perusahaan terhadap *fraudulent financial reporting*.

Hipotesis penelitian : Peranan eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.

Hipotesis statistik : $H_0 : p_{yz} = 0$

$H_1 : p_{yz} > 0$

Statistik uji : $t = \frac{p_{yz}}{S_{p_{yz}}}$

Kriteria penolakan : H_0 ditolak jika $t > t_{(1-\alpha)(n-2)}$

2) Pengujian kecocokan model (*model fit*)

Menurut Pedhazur pengujian kecocokan model dapat digunakan statistik Chi-kuadrat. Suatu model yang diusulkan dikatakan “cocok” dengan data seandainya matriks korelasi model teoritis sama dengan matriks korelasi empiris (*reproduce*). Model dikatakan “cocok” atau *fit* jika hipotesis nol diterima (Bachrudin & Tobing, 2003:37).

Hipotesis penelitian : Penerapan Sarbanes-Oxley *section 302* berpengaruh terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangka mencegah *fraudulent financial reporting*.

Hipotesis statistik : $H_0 : \mathbf{R} = \mathbf{R}(\theta)$

$H_1 : \mathbf{R} \neq \mathbf{R}(\theta)$

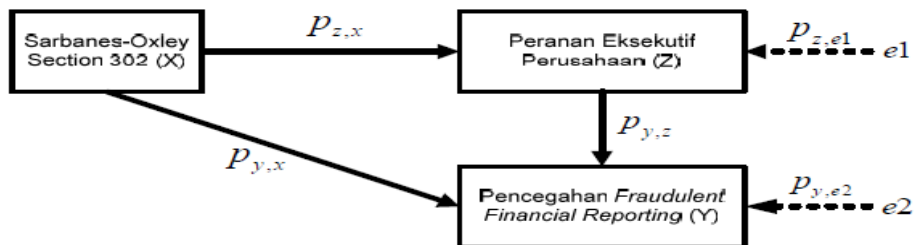
Statistik uji : $w = -(n-d) \ln \left(\frac{1-R_m^2}{1-M} \right)$, n adalah jumlah sampel

dan d adalah banyaknya jalur yang tidak signifikan.

Kriteria penolakan : H_0 ditolak jika $w < \chi_{\alpha,d}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

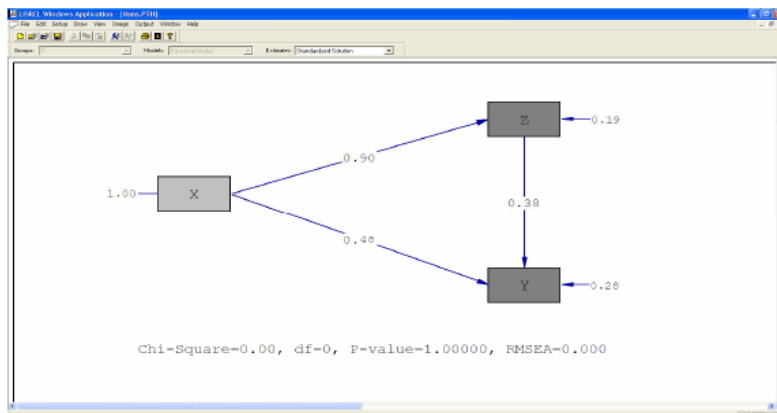
Pengaruh Variabel Penerapan Sarbanes-Oxley Section 302 Terhadap Peranan Eksekutif Perusahaan Dalam Pencegahan Fraudulent Financial Reporting Merujuk pada model yang dihipotesiskan bahwa variabel penerapan Sarbanes-Oxley section 302 mempunyai pengaruh terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangka mencegah fraudulent financial reporting maka digunakan analisis jalur untuk mencari besarnya pengaruh tersebut. Penulis menggunakan bantuan program LISREL 8.5 dengan menggunakan bahasa perintah (syntax) SIMPLIS untuk mempermudah analisis persamaan regresi dan syntax LISREL untuk analisis koefisien jalurnya. Langkah pertama dalam analisis jalur adalah menggambarkan konsep jalur (pengaruh) setiap variabel dalam model yang dihipotesiskan. Untuk menjelaskan hubungan pengaruh antar variabel tersebut akan dijelaskan pada gambar berikut :



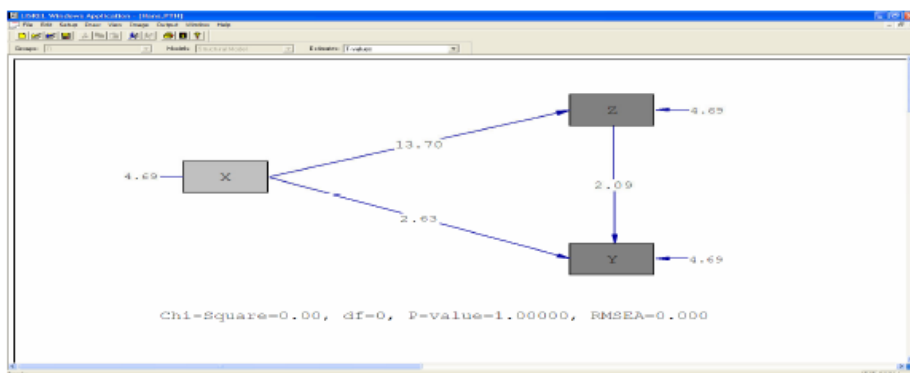
Gambar di atas konsisten dengan rumusan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu :

Hipotesis penelitian : Penerapan Sarbanes-Oxley berpengaruh positif terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam mencegah fraudulent financial reporting.

Berdasarkan output LISREL untuk analisis jalur model diperoleh hasil sebagai berikut:



Berdasarkan hasil analisis jalur dengan menggunakan LISREL, diperoleh bukti dalam gambar diatas yaitu statistik chi-square mempunyai nilai nol dan p-value sama dengan 1 pada taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, model dapat diterima ($p > 0,05$) atau dengan kata lain, terbukti secara statistik bahwa model pengaruh penerapan Sarbanes-Oxley section 302 terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangkan pencegahan fraudulent financial reporting, dapat diterima berdasarkan analisis jalur terhadap data pada taraf kepercayaan 95%. Pada hasil analisis jalur dalam gambar sebelumnya, besar pengaruh (koefisien jalur) masing-masing variabel sudah dapat diketahui. Sebelum besar pengaruh ini digunakan, terlebih dahulu dilakukan pengujian signifikansi terhadap koefisien-koefisien jalur tersebut secara satu-satu (parsial). Pengujian ini untuk menguji apakah pengaruh (koefisien jalur) yang diperoleh dalam gambar sebelumnya tersebut bermakna atau tidak. Berikut ini adalah hasil analisis pengujian signifikansi parsial dari masingmasing jalur:



Ringkasan Besarnya Pengaruh Total, Langsung dan Tidak Langsung Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Variabel		Peranan Eksekutif Perusahaan (Z)		Fraudulent Financial Reporting (Y)	
		Besarnya Pengaruh	nilai-t	Besarnya Pengaruh	nilai-t
Penerapan Sarbanes-Oxley Section 302 (X)	Pengaruh Langsung	0,90	13,70*	0,48	2,63*
	Pengaruh Tidak Langsung	0,00	0,00	0,35	2,06*
	Pengaruh Total	0,90	13,70*	0,83	9,87*
Peranan Eksekutif Perusahaan (Z)	Pengaruh Langsung	—	—	0,38	2,09*
	Pengaruh Tidak Langsung	—	—	0,00	0,00
	Pengaruh Total	—	—	0,38	2,09*

Berdasarkan hasil analisis dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika ditinjau dari hasil signifikansi koefisien-koefisien jalur yang menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh pengaruh yang diberikan variabel ndependen terhadap variabel dependen adalah signifikan, diperkuat oleh hasil engujian signifikansi model yang menunjukkan bukti yang signifikan, maka model dapat diterima pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini menjelaskan bahwa secara statistik terbukti penerapan Sarbanes-Oxley section 302 memberikan pengaruh terhadap

peranan eksekutif perusahaan serta memberikan dampak positif pada pencegahan fraudulent financial reporting.

SIMPULAN

1. Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh positif terhadap variabel peranan eksekutif perusahaan. Ho ditolak pada taraf kepercayaan 95%.
2. Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Ho ditolak pada taraf kepercayaan 95%.
3. Peranan eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap variabel fraudulent financial reporting. Ho ditolak pada taraf kepercayaan 95%.
4. Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangka mencegah fraudulent financial reporting. Ho tidak berhasil ditolak pada taraf kepercayaan 95%.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W.,S. (2003). *Fraud Examination & Prevention*. South-Western Pub.United States of America.
- Arens, Alvin, A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. (2008). *Auditing & Assurance Services an Integrated Approach*. Pearson Prentice Hall. United States of America.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bachrudin, A., dan Tobing, H.L. (2003). *Analisis Data Untuk Penelitian Survai Dengan Menggunakan Lisrel 8*. Jurusan Statistika FMIPA UNPAD. Bandung.
- Carcello, J.V. (2004). *Audit Firm Tenure And Fraudulent Financial Reporting*. University of Missouri's. United States of America.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (1999). *Fraudulent Financial Reporting : 1987 – 1997, An Analysis of U.S. Public Company*. COSO. United States of America.
- Effendi, M.A. (2008). *Sarbanes-Oxley Act Sebagai Implementasi GCG*. Akuntan Indonesia, edisi12, Oktober 2008, hal. 39-40.
- Enron Debacle, diakses dari www.riskglossary.com, pada tanggal 15 Maret 2009.
- Guy,P., & Lander. (2004). *What Is Sarbanes-Oxley?*. Mcgraw-Hill. United States of America.
- Hair, Anderson, Tatham, & Black. (1998). *Multivariate Data Analysis, 5th Edition*, Prentice-Hall International, Inc, United States of America.
- Husein, U. (2002). *Metode Komunikasi Organisasi*. PT .Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.Jakarta.
- Indrianto, N., dan Supomo, B. (1999). *Metode Peneltian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*, BPE, Yogyakarta.
- Kieso, D.E., Kimmel., P.D., Weygandt, J.J. (2002). *Accounting Principles, 6th Edition*, John Wiley & Sons, United States of America.
- KPMG. (2003). *Fraud Survey 2003*, diakses dari www.kpmg.com, pada tanggal 30 Maret 2009.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pedhazur, E.J., & Pedhazur, L.O.S. (1991). *Measurement, Design, and Analysis*. Student Edition, Lawrence Erlbaum, United States of America.
- Sarbanes-Oxley Act of 2002, diakses dari www.law.uc.edu, pada tanggal 15 Maret 2009.
- Schumacker, L.E., & Lomax, R.G. (1996). *A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling, 1st edition*, Lawrence Erlbaum, United States of America.
- Singarimbun, M., dan Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survai*. LP3ES. Jakarta.
- Sugiyono. (2001). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.

Zikmund, W.G. (1991). Exploring Marketing Research. Dryden Press. United States of America.

www.bapepam.go.id

www.telkom.co.id